

## ABSTRAK

Luthfiyah Ainul Haq, 1208010112, 2024: Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di KPU Kota Bandung (Studi Kasus PKPU No 5 Tahun 2021)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ialah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Komisi pemilihan Umum (KPU) telah mengadopsi beberapa inisiatif dan sistem berbasis elektronik dalam rangka mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai dengan peraturan presiden no 95 tahun 2018 salah satunya ialah aplikasi E-Coklit. Dalam penelitian ini terdapat kurangnya pemahaman dan kesiapan dalam penerapan teknologi SPBE, yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan proses coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauhman pelaksanaan kebijakan ini telah diimplementasikan secara optimal dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan studi kasus pada peraturan KPU no 5 tahun 2021 terkait penerapan aplikasi e-coklit di KPU Kota Bandung dengan focus pada identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III, yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka berpikir yang digunakan berfokus pada interaksi antara faktor-faktor ini, dimana komunikasi yang efektif dapat memperjelas tujuan dan Langkah implementasi, sumber daya yang memadai menentukan kelancaran operasional, disposisi yang mendukung memastikan komitmen para pelaksana, dan struktur birokrasi yang baik mendukung keteraturan dan kepatuhan terhadap kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan dan faktor faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi e-coklit di KPU Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya,serta resistensi dari beberapa pihak terkait. Kesimpulannya, meskipun implementasi SPBE melalui aplikasi E-coklit sudah berjalan dengan baik, perbaikan dalam aspek tertentu masih diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

**Kata kunci: SPBE, E-Coklit, Implementasi kebijakan.**

## **ABSTRACT**

Luthfiah Ainul Haq, 1208010112, 2024: Implementation of Presidential Regulation No. 95 of 2018 Regarding the Electronic-Based Government System (SPBE) at KPU Kota Bandung (Case Study of PKPU No. 5 of 2021)

The Electronic-Based Government System (SPBE) is the administration of government that utilizes information and communication technology to provide services to SPBE users. The General Election Commission (KPU) has adopted several electronic-based initiatives and systems in order to implement the electronic-based government system (SPBE) in accordance with Presidential Regulation No. 95 of 2018, one of which is the E-Coklit application. This research identified a lack of understanding and readiness in the implementation of SPBE technology, which impacts the efficiency of the voter data verification and research (coklit) process. This raises questions about the extent to which this policy has been optimally implemented and the obstacles faced during the process.

This study aims to analyze the implementation of Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the electronic-based government system (SPBE) with a case study on KPU Regulation No. 5 of 2021 related to the implementation of the e-Coklit application at KPU Kota Bandung, focusing on identifying factors that influence the success or failure of the policy implementation.

The approach used in this research is the policy implementation theory by Edwards III, which includes four main factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The theoretical framework focuses on the interaction between these factors, where effective communication can clarify the objectives and implementation steps, adequate resources ensure operational smoothness, supportive disposition ensures the commitment of implementers, and a well-structured bureaucracy supports order and compliance with the policy.

This research employs a qualitative method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. This approach was chosen to gain an in-depth understanding of the policy implementation process and the factors influencing it.

The results of the study indicate that the implementation of the e-Coklit application at KPU Kota Bandung still faces various challenges, including limited resources and resistance from certain parties. In conclusion, although the implementation of SPBE through the e-Coklit application has been progressing well, improvements in certain aspects are still needed to achieve optimal results.

**Keywords: SPBE, E-Coklit, Policy Implementation**